SKALA
Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar
Kemitraan Australia – Indonesia

Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
BAPPENAS
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Australian Government

KNOWLEDGE BRIEF

Perencanaan Pembangunan Daerah untuk Kebijakan dan Pelayanan Dasar yang Inklusif

Konteks

Dokumen ini ditujukan bagi para perencana di tingkat provinsi, perwakilan masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan nasional yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Brief ini menyajikan wawasan strategis untuk memperkuat proses perencanaan agar lebih inklusif, responsif, dan berbasis bukti dalam mendukung penyelenggaraan kebijakan dan pelayanan dasar.

Perencanaan pembangunan adalah instrumen kunci untuk mendorong pertumbuhan yang berkeadilan dan berkelanjutan di Indonesia. Dalam kerangka desentralisasi, pemerintah daerah memainkan peran sentral dalam menerjemahkan arah kebijakan nasional ke dalam program-program yang menjawab kebutuhan lokal.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, perencanaan yang baik dapat mendorong pemerataan, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kualitas pelayanan dasar. Proses ini bertujuan untuk memastikan konsistensi antara prioritas daerah dan strategi nasional, seperti RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) dan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional), serta mempertimbangkan dinamika spasial melalui Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Siklus Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan pembangunan daerah di Indonesia dilakukan melalui dua jalur utama yang saling terhubung: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang berlaku selama 20 tahun, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berlaku selama 5 tahun. RPJPD menetapkan visi serta arah pembangunan jangka panjang daerah, sementara RPJMD menerjemahkan visi tersebut ke dalam kebijakan, penganggaran, serta program-program sektoral yang dapat diimplementasikan. Penyusunan dokumen perencanaan ini melibatkan koordinasi erat dengan kementerian dan lembaga di tingkat nasional, serta keterlibatan pemangku kepentingan lintas sektor untuk menjamin keselarasan dengan agenda pembangunan nasional. Proses perencanaannya mengadopsi tiga pendekatan utama: **pendekatan teknokratis** yang mengandalkan data dan bukti untuk memandu pengambilan keputusan; **pendekatan politis** yang mencerminkan mandat serta arah kebijakan dari pemimpin terpilih; dan **pendekatan partisipatif** yang melibatkan masyarakat untuk menggali kebutuhan dan aspirasi mereka. Menyeimbangkan ketiga pendekatan ini menjadi kunci dalam menghasilkan rencana pembangunan daerah yang inklusif, realistis, dan responsif.

Walau mekanisme perencanaan telah tersedia, kualitasnya masih belum merata di daerah. Sejumlah pemerintah daerah masih menghadapi tantangan yang tak kunjung usai: kumpulan data yang terfragmentasi yang belum menangkap kebutuhan masyarakat yang terpinggirkan; koordinasi yang lemah di antara lembaga perencanaan dan penganggaran; rendahnya partisipasi masyarakat dalam forum perencanaan; dan instabilitas kelembagaan yang disebabkan oleh mutasi ASN. Hal ini kerap menghasilkan rencana yang tidak mencerminkan kebutuhan nyata atau tidak didukung oleh sumber daya yang memadai. Dalam banyak kasus, kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin belum terwakili dalam proses perencanaan formal. Kelompok ini kerap dilibatkan secara simbolis, namun belum memiliki pemahaman yang memadai tentang proses dan terminologi perencanaan pembangunan. Akibatnya, mereka belum dapat menyampaikan kebutuhannya secara efektif sesuai tata cara perencanaan pemerintah. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan penyediaan layanan yang inklusif, pemerintah daerah perlu mencari cara untuk membuat proses perencanaan lebih tepat sasaran, responsif, dan transparan.

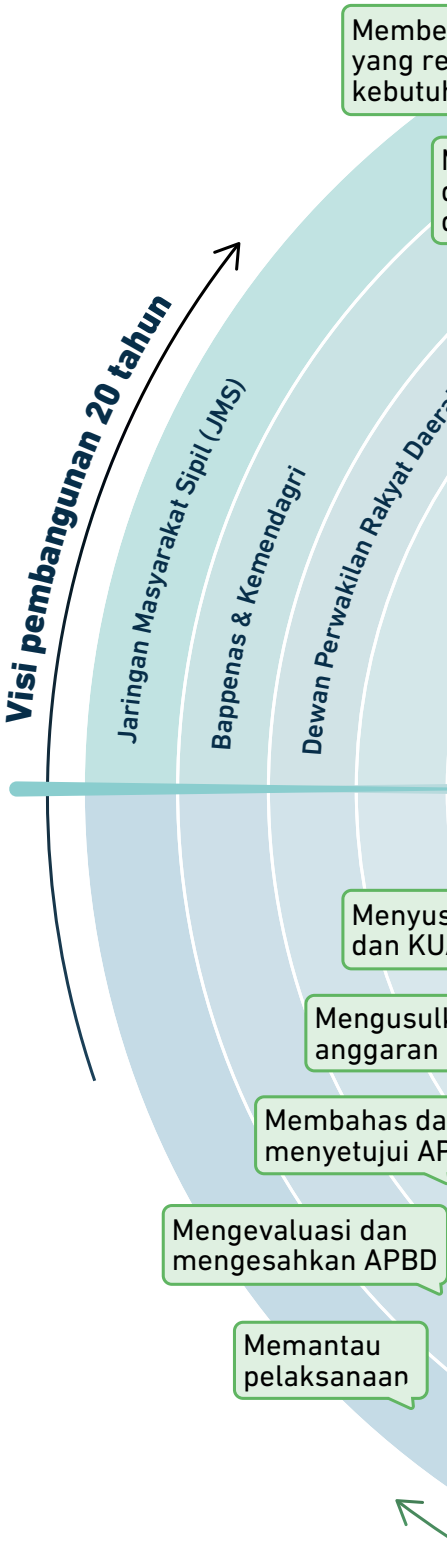

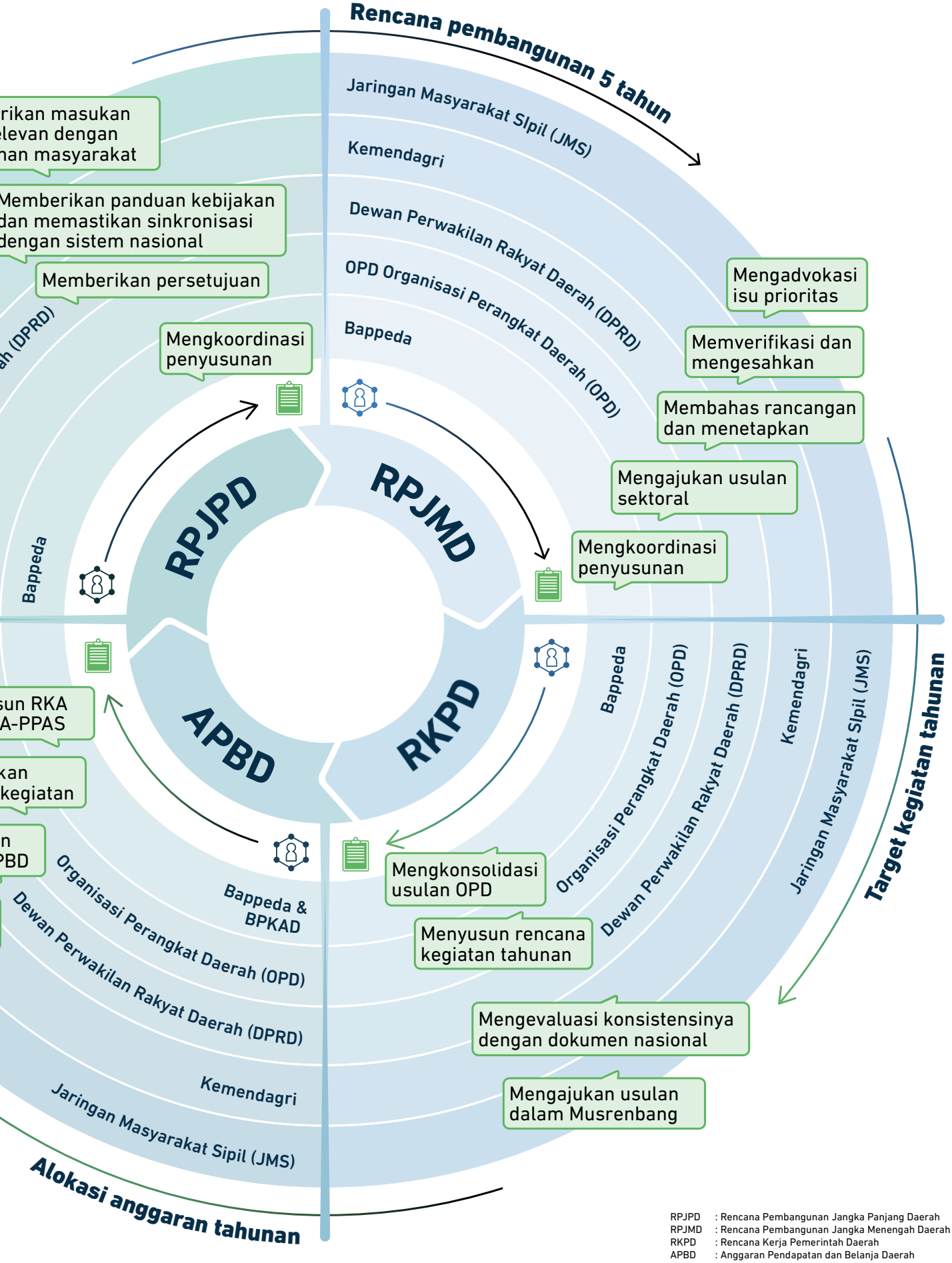

RPJPD : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
RPJMD : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RKPD : Rencana Kerja Pemerintah Daerah
APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
BPKAD : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Praktik Perencanaan yang Inklusif: Prinsip dan Pelaksanaannya

Perencanaan yang inklusif akan efektif bila dilakukan secara terarah, berbasis bukti, dan berakar pada kebutuhan nyata masyarakat. Dukungan SKALA kepada pemerintah daerah menunjukkan bagaimana tiga prinsip utama –penyelarasan makro, penggunaan data, dan partisipasi yang bermakna—dapat diterapkan secara nyata untuk memperkuat perencanaan pembangunan daerah.

1. Penyelarasan dengan Kerangka Kerja Nasional

Perencanaan yang selaras dengan tujuan nasional memastikan strategi pembangunan daerah yang terpadu, didukung sumber daya yang memadai, dan berkelanjutan. SKALA memfasilitasi koordinasi vertikal agar provinsi-provinsi mitra dapat mengintegrasikan mandat nasional seperti RPJPN, Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan target reformasi fiskal ke dalam RPJPD dan RPJMD. Beberapa provinsi mitra telah mengambil upaya signifikan untuk menyelaraskan dokumen perencanaan daerah dengan prioritas nasional, dengan dukungan dari SKALA.

- Pemerintah Provinsi **Kalimantan Utara** memperkuat RPJMD-nya dengan mengintegrasikan indikator terukur terkait GEDSI (Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial) serta layanan dasar. Hal ini dicapai melalui sesi kerja teknis dan tinjauan terstruktur, untuk memastikan konsistensi RPJMD dengan RPJPD. Dengan demikian, target pembangunan provinsi menjadi lebih relevan dan berpeluang lebih besar untuk mendapatkan pendanaan.

- Di **Aceh**, pemerintah menyusun RPJMD dengan penekanan pada SPM dan reformasi fiskal yang selaras dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Proses ini didukung oleh peninjauan yang menyeluruh serta koordinasi antarlembaga untuk menyinergikan prioritas sektoral di bidang kesehatan dan pendidikan.

- Di Provinsi **Papua Selatan dan Papua**, tim perencana mengambil langkah penting dengan mengintegrasikan arah pembangunan jangka panjang (RPJPD) ke dalam RPJMD; bagi beberapa daerah, ini merupakan yang pertama kalinya. Upaya ini dilakukan untuk menghubungkan visi pembangunan jangka panjang dengan hasil jangka menengah yang dapat ditindaklanjuti. Investasi awal dalam proses perencanaan yang terstruktur ini menjadi landasan bagi pendekatan pembangunan yang lebih bertahap dan strategis, terutama di wilayah-wilayah terpencil dan kurang terlayani yang tengah membangun kapasitas kelembagaannya.

2. Pengambilan Keputusan Berbasis Data

Perencanaan berbasis bukti dimulai dengan akses data yang andal. SKALA bekerja sama dengan mitra provinsi untuk memperkuat kapasitas daerah dalam menganalisis dan memanfaatkan data terpilah dalam perencanaan pembangunan. Upaya ini meningkatkan ketepatan penargetan, akuntabilitas, dan koordinasi lintas sektor.

- Di **Papua Barat**, instansi-instansi provinsi memanfaatkan data sosio-ekonomi dan geospasial nasional untuk memetakan masyarakat yang belum terlayani serta menyesuaikan prioritas dalam dokumen RPJPD dan RKPD. Pelatihan bagi staf provinsi tentang penggunaan SEPAKAT[1] disertai lokakarya lintas sektor, turut mendukung upaya penargetan dan penyelarasan ini. Ke depan, proses perencanaan dapat semakin mencerminkan kesenjangan di lapangan dan mendorong intervensi yang lebih terintegrasi, terutama di sektor-sektor seperti perumahan, kesiapsiagaan bencana, dan layanan kesehatan di wilayah perdesaan.

- Di **Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Gorontalo**, Bappeda berupaya mengintegrasikan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri dan platform SEPAKAT ke dalam dokumen strategis seperti Rencana Aksi Daerah. SKALA menyediakan bimbingan teknis serta mendampingi uji coba kasus penggunaan spesifik untuk program infrastruktur dan sosial. Integrasi sistem ini diharapkan memperkuat koordinasi antara fungsi perencanaan dan penganggaran, sehingga pemerintah daerah dapat mengidentifikasi kesenjangan layanan dan menerjemahkannya ke dalam keputusan pembiayaan.

- Di **Nusa Tenggara Timur (NTT**), pemerintah provinsi memimpin kegiatan pemadanan data REGSOSEK dengan daftar penerima manfaat program perlindungan sosial yang telah ada. Proses ini mengungkapkan berbagai kesalahan inklusi dan eksklusi yang kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah provinsi, bersama mitra di tingkat pusat, melalui pembersihan data, analisis, dan visualisasi. Koreksi ini mendorong pengalihan lebih dari Rp11,3 miliar untuk bantuan yang lebih tepat sasaran bagi kelompok rentan. Integrasi data yang dilakukan secara menyeluruh telah meningkatkan akurasi penargetan secara signifikan, sekaligus memperkuat kredibilitas alokasi anggaran karena didasarkan pada bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

[1] SEPAKAT adalah alat analisis yang dikembangkan oleh Bappenas untuk membantu pemerintah daerah dalam menganalisis data sosial dan ekonomi nasional guna mendukung proses perencanaan pembangunan.

3. Partisipasi sebagai Jalan Menuju Inklusi

Perencanaan partisipatif bukan sekadar persyaratan prosedural, melainkan jalan menuju penyelenggaraan layanan dasar yang inklusif, adil, dan responsif. SKALA mendukung wadah dan proses yang membuka ruang bagi masyarakat –terutama perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok-kelompok yang terpinggirkan—untuk terlibat secara bermakna dalam proses perencanaan.

- Di **Kalimantan Utara**, pemerintah daerah menindaklanjuti berbagai usulan masyarakat sipil yang disampaikan melalui Forum Aspirasi Inklusif (Mentari Kaltara), dengan mengintegrasikannya ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). SKALA berkolaborasi dengan jaringan masyarakat sipil untuk memperkuat kapasitas mereka dalam berpartisipasi dalam diskusi kebijakan teknis, serta memfasilitasi dialog terstruktur antara JMS dengan perencana pemerintah. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah daerah yang lebih inklusif.

- Di **Aceh**, reformasi pemerintah daerah memperluas akses penyandang disabilitas terhadap forum Musrenbang atau forum-forum perencanaan pembangunan lainnya. Penyesuaian dilakukan terhadap format pengajuan usulan, disertai dengan penjangkauan yang terarah untuk mendorong partisipasi yang lebih luas. Melalui kerja sama dalam penyusunan panduan perencanaan yang inklusif serta mekanisme umpan balik, Aceh kini dapat melacak sejauh mana masukan warga diakomodasi dalam dokumen perencanaan. Transparansi ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mendorong partisipasi yang lebih besar dalam proses perencanaan pemerintah.

- Sementara itu, di **Papua**, penyusunan RPJPD dilakukan melalui pendekatan konsultatif yang disesuaikan dengan konteks budaya, dengan mengakomodasi suara para pemimpin Adat dan Dewan Adat Papua. SKALA bermitra dengan Papua untuk menerjemahkan dokumen-dokumen penting serta merancang alat fasilitasi yang mudah diakses. Pemerintah provinsi kini mulai mengaitkan rencana pembangunan dengan nilai-nilai masyarakat, guna memperkuat legitimasi perencanaan di wilayah-wilayah dengan kelembagaan pemerintah yang masih relatif baru atau belum sepenuhnya mapan.

Faktor Penentu Keberhasilan

Perbaikan yang berkelanjutan dalam perencanaan pembangunan daerah sangat bergantung pada kondisi pendukung yang tepat. *Pertama,* regulasi nasional yang jelas dan konsisten menciptakan lingkungan kebijakan yang stabil serta menetapkan ekspektasi bersama di seluruh tingkat pemerintahan. *Kedua*, kepemimpinan daerah yang kuat menjadi kunci untuk mendorong reformasi, mengatasi resistensi, dan memperjuangkan penerapan praktik-praktik yang lebih inklusif. *Ketiga*, keberadaan unit perencanaan yang andal memastikan tersedianya rumah kelembagaan bagi proses perencanaan jangka panjang yang kuat secara teknis. *Keempat*, kolaborasi lintas lembaga yang efektif –baik secara horizontal maupun vertikal—memungkinkan integrasi kebijakan yang lebih baik, penyelesaian masalah secara kolektif, dan akuntabilitas bersama. *Terakhir*, keberlanjutan tenaga fungsional dan pengembangan kapasitas yang terus-menerus membantu menjaga memori kelembagaan dan memastikan bahwa sistem perencanaan tetap berjalan efektif, bahkan di tengah perubahan politik atau struktural.

Pembelajaran Penting untuk Memperkuat Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan daerah yang berkelanjutan dan inklusif tidak hanya bergantung pada proses yang kuat, tetapi juga pada sistem, peran, dan perangkat yang mendukungnya. Sejumlah pembelajaran praktis muncul dari kolaborasi SKALA dengan para provinsi mitra.

Mulai dan bangun dari fondasi yang sudah ada.
Manfaatkan kerangka regulasi dan kelembagaan yang telah tersedia, seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 89 Tahun 2021 dan peran strategis Bappeda, sebagai dasar untuk memperkuat koordinasi, sinkronisasi kinerja, dan perencanaan yang lebih terarah di tingkat daerah.

Gunakan data terpilah dan tervalidasi untuk menetapkan prioritas.
Akses data pemanfaatan alat analisis menjadi kunci untuk menerjemahkan kebutuhan masyarakat ke dalam intervensi yang tepat sasaran, serta menyusun dokumen perencanaan yang berbasis bukti dan dapat dipertanggungjawabkan secara anggaran.

Pastikan partisipasi yang inklusif terintegrasi dalam proses, bukan hanya pelengkap sementara.
Partisipasi publik perlu diperluas dari sekadar forum Musrenbang menjadi bagian integral dari seluruh tahapan dalam siklus perencanaan. Hal ini perlu didukung dengan pedoman yang jelas, mudah dipahami, dan disampaikan secara tepat waktu kepada seluruh pemangku kepentingan. Perhatian khusus perlu diberikan untuk menjangkau kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan organisasi masyarakat sipil.

Pantau pemanfaatan usulan dari masyarakat.
Mekanisme umpan balik penting dikembangkan untuk memantau sejauh mana usulan warga dan JMS diakomodasi dalam dokumen perencanaan akhir.

Sesuaikan solusi dengan konteks lokal, namun tetap selaraskan dengan sistem nasional.
Inovasi daerah dalam perencanaan dan pemanfaatan data sangat penting, namun perlu tetap diselaraskan dengan sistem nasional seperti SIPD dan SEPAKAT, untuk menjamin relevansi lokal sekaligus keterpaduan secara nasional.

Perkuat jabatan fungsional untuk menjaga keberlanjutan dan pengetahuan kelembagaan.
Penguatan kapasitas bagi perencana dan tenaga statistik dalam jabatan fungsional perlu diprioritaskan agar memori kelembagaan tetap terjaga dan proses perencanaan tetap berjalan efektif, meskipun terjadi pergantian kepemimpinan atau perubahan struktur organisasi.

SKALA
Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar
Kemitraan Australia - Indonesia

IFC Tower 2, Level 17
Jl. Jendral Sudirman Kav. 22-23 Jakarta 12920

skala.or.id communications@skala.or.id

Website SKALA:

WA Channel SKALA: